

## Komitmen Memberantas Korupsi Meningkatkan Citra Polri

Oleh Herie Purwanto, S.H \*)

### Latar Belakang

Laporan terbaru dari rating *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berada di Hongkong menyebutkan bahwa Indonesia sukses mencatat skor 9,92. Artinya Indonesia pada tahun 2002 ini kembali mencatat sebagai tiga besar sebagai negara terkorup di Asia. Bahkan dengan skor baru tersebut, Indonesia menduduki ranking pertama. Menyusul kemudian India, Vietnam dan seterusnya hingga menjadi juru kunci alias terbersih dari korupsi adalah Singapura.

Untuk sekedar catatan, sejak tahun 1995, skor 9,92 tersebut merupakan skor terparah. Sebab tahun 2001 yang lalu, Indonesia masih berada di peringkat ketiga. Artinya dalam tahun berikutnya bila tidak ada satu *political will* tidak bisa dibayangkan lagi betapa korupnya negeri ini. Hal ini menjadi kian ironis sebab di negara tetangga lainnya seperti India dan Vietnam misalnya mengalami perbaikan *recovery* di bidang korupsi dari tahun ketahun.

Realita yang demikian tentu saja

memperhatikan sebab masalah tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang multi kompleks baik dari aspek penyebab sampai pada upaya penanggulangan atau *law enforcement*nya. Pada sisi *law enforcement* atau penegakan, hukum inilah, jajaran kepolisian negara republik Indonesia atau Polri menjadi urgen.

Tidak dipungkiri, bahwa era sebelum reformasi, Polri nyaris tenggelam upaya pemberantasan korupsi. Seakan-akan lembaga kejaksaan yang tampil sendirian dan terdepan dalam masalah ini. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah Polisi yang berhak menangani adalah kejaksaan. Buktinya kasus-kasus penyalahgunaan uang Bangdes, dana IDT, dana KUD pada era pra reformasi ditujukan kepada kejaksaan, bukan kepada Kepolisian setempat.

Namun, sebagaimana diketahui bersama, belakangan ini Polri seperti tergugah dari tidur panjangnya untuk tampil memfungsikan perannya sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU untuk memberantas korupsi. Sederet kasus korupsi toh akhirnya ditangani oleh jajaran Polri seperti kasus dugaan Korupsi yang melibat-

\*) Penulis bertugas pada Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah.

kan mantan Menteri Koperasi Bustanil Arifin untuk tingkat Mabes, penanganan korupsi di KUD Jateng oleh Polda Jateng, serta masalah bengkok-gate, terminal gate di wilayah Polwil Pekalongan. Contoh ini dikemukakan sebagai sampel yang ingin menunjukkan bahwa kini telah muncul komitmen dari Polisi untuk memberantas korupsi.

Kondisi seperti ini tentu saja memberikan satu wacana positif dalam membangun image baru pada masyarakat tentang citra Polri. Korelasinya adalah bahwa masalah korupsi di era reformasi ini merupakan satu musuh nasional di samping kolusi dan nepotisme. Sehingga apabila komitmen Polri dalam memberantas korupsi menjadi bagian dari *political will* jajaran pimpinan Polri mempunyai nilai signifikan yang tinggi bagi kepercayaan dan citra masyarakat kepada Polri.

Menyangkut citra Polri itu sendiri, dimaklumi bersama bahwa “terkebiri” oleh *powerfull* era orde baru membuat Polri terseret pada jaringan birokrasi yang nyata-nyata belakangan ini telah membentuk sebuah gurita dan budaya korupsi. Bisa dibayangkan, bagaimana tangan dan kaki gurita raksasa bila sudah membelit sebuah kapal di tengah lautan. Harapan yang tersisa tentu saja kapal akan tenggelam sebelum oleng ke sana ke mari tanpa daya.

Oleh karenanya, ibarat tangan dan kaki gurita tadi, secerah harapan tetap

saja harus muncul, yaitu dengan satu komitmen bahwa masalah korupsi perlu penanganan yang serius bukan hanya komitmen bagi jajaran penegak hukum, masyarakatpun harus mulai membiasakan diri dan siap menghadapi dan membantu Polri khususnya dalam menangani masalah korupsi.

### **Bebas Dari Intervensi.**

Salah satu kendala besar yang dihadapi Polri dalam memberantas korupsi adalah intervensi atau campur tangan pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu di sini adalah dari pihak intern maupun ekstern. Artinya campur tangan bisa dan sangat mungkin muncul dari kalangan Polri sendiri, di samping dari lembaga vertikal maupun horisontal.

Kasus sederhananya misalnya bila satu Polres tengah menangani satu kasus korupsi, intervensi bisa muncul dari jajaran birokrasi pemerintah daerah setempat, jajaran DPRD II (ekstern). Sedangkan yang intern, bisa saja adanya Mr. X di tingkat Polwil atau Polda, bahkan Mabes yang memerintah Kapolres untuk “memainkan” atau “memetieskan” masalah korupsi yang tengah ditangani.

Logika sederhananya adalah apabila seorang Penyidik di tingkat KOD (Komando Operasional Dasar) setingkat Polres mendapat katabelece atau surat sakti dari atasannya baik

secara vertikal maupun horisontal akan merasa "rikuh pekewuh" atau merasa tidak enak, sungkan dan sebagainya. Kondisi yang demikian inilah yang merupakan salah satu ciri tangan dan kaki gurita korupsi yang telah diuraikan tadi.

Pada komitmen yang tengah dicanangkan di jajaran Polri sekarang terhadap tindak pidana korupsi, kendala ini harus diatasi dengan satu pijakan yuridis yang ada serta adanya *backing policy* dari pucuk pimpinan Polri itu sendiri. Artinya, apabila penanganan masalah korupsi di tingkat KOD atau di bawah Mabes sekalipun, Kapolri menjadi satu poin center. Dengan fungsi yang demikian tentunya pelaksana di lapangan tidak merasa ada perasaan takut, ragu-ragu dan sejenisnya. Bayang-bayang point center tadi bisa menjadi satu kekuatan secara psiki untuk tetap berada pada jalur komitmen tadi.

Konteks kemandirian dan otonomi yang tengah melanda negeri ini bisa menjadi satu kekuatan tambahan untuk membentengi intervensi. Pengalaman pahit adanya kekuatan yang terpusat oleh penguasa orde baru, pada era reformasi ini sudah semestinya tidak mendapat tempat lagi, lebih-lebih dalam penegakan hukum. Masyarakat sekarang yang tengah menuju pada *civil society* atau masyarakat madani menghendaki adanya supremasi

hukum. Masa transisi yang demikian menjadi satu celah atau peluang yang besar adanya dukungan dari masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari parameter supremasi hukum tadi.

### Dukungan Dari Masyarakat

Fakta dukungan yang besar dari masyarakat ini bisa dilihat dari pemberitaan di media massa di mana LSM, ormas maupun masyarakat secara kelompok atau perorangan dengan berani dan kesadaran tinggi melaporkan kasus korupsi ke kantor polisi. Bentuk laporannya baik secara surat, surat pembaca di media massa maupun dengan penyampaian fakta-fakta langsung ke Polri. Wacana yang demikian ini tentu saja membuka lebar dukungan dari masyarakat bagi komitmen Polri untuk menanganinya secara serius.

Masyarakat sudah sadar sepenuhnya bahwa salah satu penyebab kehancuran perekonomian negeri ini karena korupsi, sehingga mereka tidak ragu atau takut untuk menyampaikan adanya penyimpangan atau praktik-praktik korupsi di semua ini perikehidupan mereka. Baik di lingkungan tempat tinggal, desa, kecamatan, instansi swasta, pemerintah, BUMN hingga ke jajaran TNI maupun Polri.

Pada kasus surat pembaca di mana ditulis tentang ketidak beresan pengurusan STNK maupun BPKB,

pembuatan SIM yang membengkak dari dana yang semestinya serta kurang transparansinya dana-dana yang terpungut tanpa adanya kuitansi, merupakan indikasi keberanian masyarakat tadi dalam mengkritik instansi Polri.

Belum lagi masalah penyalahgunaan dana-dana pembangunan, masalah sarana sosial, sarana umum dan sebagainya. Masyarakat sudah tidak lagi menyembunyikan fakta-fakta tadi dengan menyuarakannya secara langsung maupun tidak langsung. Bisa diikuti beritanya sekarang ini, bagaimana sekelompok warga atau LSM mendatangi instansi tertentu dengan memaparkan fakta-fakta yang menjurus ke arah terjadinya korupsi tanpa takut adanya intimidasi maupun tekanan-tekanan tertentu, di mana kondisi ini acapkali muncul di era terdahulu, pra reformasi.

Fenomena demikian tentunya tidak terlepas dari perubahan dan dinamika sosial politik di negeri ini. Masyarakat sejak menggemakan reformasi menghendaki adanya transparansi yang menyangkut pelayanan publik. Sehingga tidak heran bila untuk menggapai supremasi hukum, masyarakat menggunakan haknya secara massal melakukan gugatan atau class action sebagai bagian dari upaya untuk memberantas KKN.

Tentu saja, Polri yang merupakan alat negara penegak hukum harus

merespon positif dukungan dari masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu variabel penting atau kesempatan emas bagi peningkatan citra Polri ke depan.

### **Menyangkut Sumber Daya Manusianya**

Masalah korupsi merupakan masalah yang kompleks bahkan sering tidak lepas dari masalah politis. Sehingga menangani masalah korupsi, Polri akan dihadapkan pada satu tantangan yang menuntut profesionalitas. Salah satunya adalah dengan sumber daya penyidiknyanya.

Penyidik tindak pidana korupsi tentu saja identik dengan "Mr Clean". Artinya penyidik-penyidik atau penyidik pembantu yang ditugaskan untuk itu haruslah pilihah, baik dari aspek kemampuan teknis, penguasaan hukum, penguasaan materi serta yang tidak kalah penting dan harus menjadi prioritas adalah mereka yang digolongkan komit terhadap korupsi. Variabel yang muncul tentunya masalah moralitas dan idealisme. Jangan sampai muncul pertanyaan atau keraguan dari masyarakat, bagaimana mungkin menyidik masalah korupsi kalau personilnya terkenal korup?

Penulis sangat yakin, sumber daya ideal tadi masih banyak dimiliki Polri. Untuk masa sekarang tentunya memanfaatkan Mr. Clean-Mr Clean yang ada. Namun untuk jangka ke

depan, penanaman doktrin anti korupsi harus sudah tertanam sejak rekrutmen anggota. Polri disegala jenjang pendidikan pendidikan baik tamtama bintara maupun perwira.

Kalau sejak masa rekrutmen sudah terkondisi iklim yang bebas KKN, tentunya setelah lulus dan dilantik menjadi penyidik, mereka akan memiliki peluang sebagai Mr. Clean yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

### Strategi Penanganan

Dalam masalah korupsi ini, ada pepatah bijak yang menyebutkan bahwa busuknya ikan berawal dari kepalanya. Artinya seorang pimpinan baik di tingkat unit, seksi, bagian dan seterusnya hingga ke top manejer mempunyai peran yang besar bagi bersih atau tidaknya sebuah organisasi. Bagaimana sebuah KOD komitmen dengan masalah korupsi bila kepala kesatuannya saja "tidak bersih"? Tentunya para penyidik dan penyidik pembantunya akan setengah hati melaksanakan perintah itu. Maka seharusnya (das sollen) yang tampil sebagai Mr. Clean adalah jajaran kepalanya dulu, sehingga anak buahnya secara keseluruhan tidak ikut membusuk, sebagaimana pepatah ikan tadi.

Pada awalnya, menggebrak tindak pidana korupsi akan dihadapkan

banyak kendala. Variabel pembuktian kasus korupsi tidak semudah pembuktian perkara pidana lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi biasanya berasal dari kalangan "pemilik kekuasaan" atau powerfull tertentu, apakah dalam bentuk pengaruh massa, kekuasaan atau materi dan dekat dengan kalangan akademisi terutama tidak segan-segan menggunakan jasa *lawyer* kelas atas untuk membela perkaranya.

Seseorang yang memiliki kekuasaan, kedudukan dan prestise yang tinggi kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi, maka dia akan berusaha berkelit dari tuduhan itu. Sehingga seluruh kekuatan yang dimiliki akan diberdayakan. Sebab mereka sadar terperangkap ada perkara korupsi akan berdampak pada nama baik dan kepercayaan relasi maupun psikis keluarga dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Korelasinya dengan strategi penanganannya adalah dengan memblow up sejak dini upaya hukum yang dilakukan. Dengan *blow up*, di mana setelah didasari pada alat bukti yang ada, masyarakat luas atau publik segera tahu bahwa Polri tengah menyidik perkara korupsi. Dalam kondisi masyarkat yang sekarang ini, tentunya akan muncul empati dan simpati kepada Polri.

Terlebih apabila *blow up* tadi

disertai dengan kesungguhan penyidikan perkara hingga tuntas dan diterima oleh penuntut umum. Masyarakat tentunya tahap demi tahap akan mengikuti bagaimana upaya hukum yang dilakukan Polri dalam membuktikan praktik korupsi yang diadakan masyarakat.

Dari beberapa sumber kajian yang penulis dapat, berikut ini dikemukakan beberapa strategi penanganan tindak pidana korupsi di samping strategi Mr. Clean dan *Blow up* tadi, yaitu :

Pertama, penyidik dalam menggali sumber keterangan dari saksi harus rinci dan sistematis. Pada tindak pidana korupsi biasanya akan melibatkan banyak saksi yang berakibat pada munculnya banyak keterangan. Keterangan yang ada disusun dalam satu sistematis mengarah pada bidang kerucut pembuktian.

Kedua, dalam pengumpulan data yang menyangkut angka-angka, tabel atau hitungan matrik-teknis tertentu, sebelum melakukan pemeriksaan perlu dilakukan pengkajian awal atau perbandingan kasus dengan pihak yang ahli atau menguasai materi tersebut, sehingga saat pemeriksaan saksi maupun tersangka, pertanyaan sudah terarah dan akan efektif. Kemampuan yang terarah dari penyidik akan memberikan image bahwa penyidiknya sudah menguasai permasalahan dalam skala teknis sekecil apapun.

Ketiga, penyidik yang menangani tindak pidana korupsi sebaiknya dikonsentrasikan pada satu perkara, tidak bercabang-cabang, sehingga perhatian serta kemampuannya benar-benar tercurah pada satu beban pembuktian. Lebih-lebih apabila tindak pidana korupsi yang disidik memiliki nilai atensi publik yang besar, misalnya melibatkan tokoh masyarakat, pejabat instansi serta figur publik lainnya di mana hal ini juga menjadi incaran kalangan pers.

Keempat, bagi internal penyidik sendiri, tidak harus menargetkan kasus yang diangkat, harus berakhir P-21 atau diterima oleh penuntut umum. Sebab pemaksaan kehendak akan mempengaruhi kinerja pembuktian. Hakikatnya menangani tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat sekarang ini, sudah memberikan satu penilaian positif dan membangun image building bagi citra Polri. Tentunya untuk jangka panjang, bukan sekedar menerima laporan, memeriksa saksi dan tersangka, namun harus benar-benar menjadi satu berkas dan diterima oleh PU serta hakim bisa memvonis maksimal hukuman pada tersangka. Strategi ini merupakan bagian dari proses pendewasaan profesionalitas kemampuan Polri dalam menyidik perkara korupsi pada tingkat tertentu yang prediksi awalnya rumit dalam pembuktiannya.

Kelima, menumbuhkan satu keyakinan profesionalitas, bahwa satu perbuatan pidana, tidak ada yang sempurna. Sehingga apapun rumitnya kasus, bila diurai satu persatu, perlahan-lahan dan penuh dengan itikad baik, niscaya akan terkuak juga. Bukankah pepatah bijak menyebutkan sependai-pandai menyembunyikan bangkai, akhirnya akan tercium juga baunya?

#### **Kesimpulan.**

Akhirnya, dalam kondisi psikis sekarang ini, masyarakat sangat responsif terhadap segala upaya penegakan hukum menuju tercapainya supremasi hukum. Masalah KKN, disadari oleh masyarakat sebagai salah satu sebab hancurnya perekonomian negeri ini.

Polri yang merupakan alat negara penegak hukum, sangat tepat apabila memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Wewenang

yang selama ini nyaris kurang berfungsi, bisa dijadikan salah satu upaya Polri membangun citra lembaga agar lebih dicintai masyarakat. Komitmen Polri memberantas kompsi membuka peluang yang lebar terbentuknya image building, bahwa dengan kemandirian serta keotonomian Polri bisa menjadikan lembaga ini berada pada posisi yang terhormat di roata masyarakat.

Tentu saja banyak hal yang harus dilakukan oleh Polri dalam memegang komitmennya tadi, yaitu mengawali secara internal untuk "bersih dulu" sebelum "membersihkan" orang lain. Kemudian stmtegi profesionalitas bagi penyidik yang menangani perkara kouplesi, sebab taktik dan teknis menyidik korupsi memiliki karakteritik tersendiri. Korupsi bukan sekedar masalah ekonomi, namun juga bisa berkaitan dengan aspek politis dan kekuasaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon 881826, 882467  
BOJONEGORO

*Mengucapkan :*

*Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H*

*Minat Aidhin Walfa'ihin*

*Mohon Maaf Lahir dan Batin*